

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA TERHADAP ETNIS CINA

A. Konsep Integrasi di Malaysia

A.1 Definisi Konseptual *Unity in Diversity*

Sebagai solusi untuk mengakhiri keterpurukan akibat berbagai konflik antaretnis di Malaysia, pemerintah Malaysia melaksanakan gerakan masyarakat melalui *way of life* mereka, atau pandangan hidup mereka, yaitu *Unity in Diversity*. *Unity in Diversity* ialah menghayati persatuan dalam keragaman, dalam arti, adanya perbedaan antaretnis dianggap dapat memperkaya kebudayaan yang ada, sehingga pemerintah memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan setiap budaya yang ada di Malaysia.¹

Masyarakat yang berkeadaban (*civil society*) menurut pemerintah Malaysia hanya dapat terwujud melalui pencerahan berpikir masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Adanya *Unity in Diversity* membuat antaretnis di Malaysia saling menghargai, atau saling menghormati. Penerapan *Unity in Diversity* dikukuhkan di Malaysia untuk menghindarkan diri dari konflik karena dipahami bahwa di Malaysia terdapat berbagai etnis.

Definisi konseptual *Unity in Diversity* yaitu suatu pandangan bahwa setiap kelompok diwakili dalam suatu lembaga sesuai dengan

¹ Pikiran Rakyat, "Krisis dan Strategi Kebudayaan Baru," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/10/0803.htm>, diakses tanggal 3 Juli 2007.

proporsi pendukungnya. Dengan demikian, setiap etnis dapat mengutarakan ide dan mengembangkan kebudayaannya tanpa mendapat tekanan dari etnis lain. Etnis Cina, di Malaysia, tidak menanggalkan identitas dirinya dengan adanya penerapan *Unity in Diversity* itu. Budaya Cina dianggap oleh pemerintah Malaysia sebagai budaya yang memperkaya kebudayaan Malaysia.²

Unity in Diversity yang dianut oleh Malaysia selanjutnya mempunyai beberapa ciri yang khas yaitu:

1. Adanya pengelompokan masyarakat dalam setiap kubu yang sangat kedap, tertutup rapat, dan sulit ditembus dari luar.
2. Adanya komunikasi secara vertikal yang menghubungkan massa dan elitnya (pemimpinnya) dalam setiap kelompok.
3. Adanya pelembagaan perundingan antarelite. Maksudnya perundingan antarelite dijadikan proses negosiasi yang melembaga.

Sementara itu, orang-orang Belanda menggunakan istilah *verzuijing* untuk menggambarkan situasi masyarakat yang terbagi dalam pilar-pilar yang menyangga kubah pada bangunan-bangunan kuno di Yunani. Pada kubah atau puncak bangunan sosial tersebut terjadi akomodasi dan kompromi antar elite dari setiap pilar.

A.2 Definisi Operasional

Hubungan antara pengusaha Cina dan penguasa Malaysia, baik kolonial maupun bumiputera telah terjalin suatu hubungan yang saling

² *Ibid.*

menguntungkan keduanya. Hubungan tersebut terjadi karena kesamaan kepentingan. Para pengusaha memerlukan perlindungan hukum dari pesaing mereka, sementara para penguasa membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan pribadi dan menjaga prestise sosial mereka.

Malaysia mempunyai warga negara yang heterogen, yaitu etnis Melayu, Cina, India, dan Pakistan. Definisi operasional *Unity in Diversity* di Malaysia membuat antaretnis intens dengan etnisnya sendiri dan berusaha memajukan etnisnya. Penerapan *Unity in Diversity* di Malaysia sebagai berikut:

1. Orang Cina diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan identitas dirinya sebagai etnis Cina. Mereka dengan bebas mengaktualisasikan identitas dirinya sebagai etnis Cina. Mereka tidak perlu mengubah namanya menjadi nama melayu. Etnis Cina diakui di Malaysia sebagai etnis yang ikut membangun perekonomian Malaysia karena mayoritas etnis Cina pandai melakukan bisnis dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha.
2. Etnis Cina bebas beribadah sesuai dengan agamanya dan diberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan budayanya. Mereka tidak dipaksakan oleh pemerintah Malaysia untuk menganut agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Malaysia. Agama Konghucu yang merupakan agama asli etnis Cina diakui di Malaysia dan mereka diberikan kebebasan untuk berubadah sesuai dengan agamanya. Kebudayaan etnis Cina seperti barong sai, dan bela diri

kung fu dapat berkembang di Malaysia karena pemerintah merasa hal itu sebagai kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan Malaysia.

Penerapan *Unity in Diversity* ini menyebabkan kehidupan etnis, di Malaysia yang terkotak-kotak, dan antaretnis sulit membaur. Posisi dominan dalam bidang ekonomi dimainkan dan dimiliki oleh etnis Cina. Dengan uang, barang, dan prestise yang tinggi, etnis Cina menguasai jaringan bisnis, sehingga kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dan Melayu semakin lama semakin dalam.

B. Kronologi Etnis Cina di Malaysia

Pendatang Cina awal (sejak abad ke-15 di Melaka; abad ke-18 di Pulau Penang) membentuk suku kaum Cina Peranakan atau Cina Selat yang memeluk kebanyakan adat Melayu secara berbeda (sebagian di Pulau Penang, menyeluruh di Melaka), berbahasa Melayu, tetapi memeluk agama Cina. Sebaliknya, pendatang-pendatang yang lebih lanjut (pada awal abad ke-19) yang melestarikan adat Cina dikenali sebagai Sinkheh (tetamu baru).³

Kaum Cina di Malaysia mengekalkan identitas komunitasnya yang sangat berbeda dengan kaum lain dan jarang melakukan kawin campur dengan orang Melayu karena agama dan budaya yang berbeda. Kebanyakan orang Cina Malaysia menganggap "kecinaan" mereka sebagai satu identitas etnis, budaya, dan politik.

³ Wikipedia, "Orang Cina Malaysia," http://ms.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Cina_Malaysia, diakses tanggal 5 Mei 2007.

Orang Cina Malaysia sejak lama mendominasi ekonomi Malaysia, tetapi semenjak adanya kebijakan oleh kerajaan Malaysia untuk melindungi kepentingan masyarakat pribumi, dominasi etnis Cina di Malaysia dalam bidang ekonomi menyusut. Namun, etnis Cina masih merupakan golongan mayoritas di Malaysia. Pada tahun 2006, terdapat 7-7.5 juta orang Cina di Malaysia.

Kebanyakan pendatang Cina di Malaysia berasal dari wilayah Cina selatan, terutama wilayah Fujian dan Guangdong. Pada abad ke-19, kebanyakan mereka datang untuk bekerja sebagai "buruh terikat" melalui perjanjian tertulis (*indentured labour*). Selain datang secara bebas untuk bekerja, dan didukung oleh Persatuan Suku Kaum, populasi orang Cina di Malaysia menjadi sangat banyak, yaitu 269.854 jiwa pada tahun 1911, dan kira-kira sejuta sekitar tahun 1949.⁴

Etnis Cina, di Malaysia, terdiri dari beberapa suku dialek. Terdapat enam kumpulan dialek utama, yaitu: Hakka, Kantonis, Hokkien, Teochew, Hainan dan Hokchiu. Orang Hakka membentuk kumpulan dialek terbesar di Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), sebagian Johor terutama di Kulai, Selangor-Kuala Lumpur, dan Pahang. Suku Hakka, juga, terdapat di Johor Baru dan Perak.

Suku Kantonis membentuk suku dialek terbesar di Selangor, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan dan Perak. Suku Kantonis juga membentuk suku dialek terbesar di Johor Timur, Sandakan, dan Sabah. Sandakan pernah

⁴ *Ibid.*

bergelar "Hong Kong Kecil" karena bandar itu pernah dijadikan tempat tinggal kedua bagi kebanyakan pendatang dari Guangdong, yang pemandangannya menyerupai Hong Kong pada 1970-an dan 1980-an. Media bahasa Kantonis juga disiarkan dalam saluran televisi Malaysia, terutama RTM2 dan 8TV.

Sementara itu, suku Hokkien membentuk suku dialek terbesar di Pulau Penang, Melaka, Kedah, Terengganu, Kelantan, Selangor, terutama di Klang dan kawasan pantai Selangor serta Johor barat. Bahasa Hokkien juga dituturkan di ibu kota Sarawak, yaitu Kuching. Suku Teochew berada di sebagian Pulau Penang, kebanyakan pulau-pulau di Sabah dan Johor selatan, terutamanya Johor Baru dan Pontian.

Antara tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohammad bin Mohammad, perdana menteri keempat Malaysia. Dalam periode ini, terjadi peralihan dari ekonomi berdasarkan agrikultur menjadi produksi dan industri dalam bidang komputer dan elektronik konsumen.

Pada akhir tahun 1990-an, Malaysia diguncang krisis finansial Asia. Oposisi muncul dalam beberapa aspek sistem yang ada, sehingga dapat menjatuhkan pemerintah. Oposisi itu muncul dari golongan sosialis dan golongan reformis sampai partai yang mengadvokasikan pembentukan negara Islam. Pada tahun 2003, Dr. Mahathir Mohammad, perdana menteri yang menjabat terlama di Malaysia, mengundurkan diri dan menyerahkan

jabatannya kepada deputinya, Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari. Meskipun pergantian Perdana Menteri, Malaysia tetap menerapkan *Unity in Diversity* dalam menyikapi berbagai etnis yang ada di Malaysia.

C. Penerapan *Unity in Diversity* di Malaysia

Malaysia menerapkan *Unity in Diversity* sejak tahun 1969 saat terjadi kerusuhan etnis Melayu melawan etnis Cina yang memakan banyak korban jiwa. *Unity in Diversity* menekankan perhatiannya pada pentingnya konsensus yang membutuhkan adanya suatu lembaga ataupun wadah yang mereka anggap dapat mewakili kepentingan mereka. Sebagaimana kesepakatan yang telah dicapai oleh para pemimpin-pemimpin pada masa awal kemerdekaan, bahwa pemerintah mayoritas akan dipegang oleh kelompok Melayu tanpa mengabaikan kelompok etnis yang lain. Meskipun demikian, kesepakatan awal itu tidak mampu membutuhkan ikatan-ikatan primordial yang ada. Ikatan-ikatan primordial itu justru semakin diperkuat dengan diberikannya pemegang pemerintahan kepada kelompok Melayu. Inggris, bahkan, mengakui bahwa orang-orang Melayu adalah satu-satunya rakyat yang harus dimintai persetujuannya sebelum mengadakan perubahan di Malaysia.

Kelompok Melayu mengklaim dirinya sebagai penduduk asli dan menganggap kelompok Cina dan India sebagai pendatang. Oleh sebab itu, mereka merasa bahwa mereka adalah pemilik "Malaysia" dan berhasil

meletakkan dasar-dasar konstitusional yang mengukuhkan mereka sebagai penguasa melalui simbol-simbol Melayu, seperti: Sultan (Yang Dipertuan Agung) sebagai kepala Negara, bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional, dan Islam sebagai Agama negara, dan non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Oleh sebab itu, non-Melayu menuntut persamaan hak-hak yang positif dan kewarganegaraan yang sama dengan kelompok Melayu dengan alasan bahwa merekalah yang membangun Malaysia menjadi makmur.

Jika dalam asimilasi etnis Cina tidak memiliki peran dalam politik, maka dalam *Unity in Diversity* berpegang pada prinsip proporsional. Setiap kelompok akan diwakili dalam suatu lembaga sesuai dengan proporsi pendukungnya. Malaysia mempunyai warga negara yang heterogen, yaitu ras Melayu, Cina, India, dan Pakistan. Tentunya, tidak diingkari bahwa ada sebagian kecil masyarakat yang mempunyai kelebihan, misalnya, sebagian kecil birokrat Melayu yang tinggal di kota-kota besar. Potensi konflik telah diantisipasi oleh pemerintah Inggris. Menjelang kemerdekaan Malaysia, Inggris membentuk partai-partai politik yang didasarkan pada ras. Pembentukan partai berdasarkan ras tersebut sulit sekali dihindarkan karena pengelompokan komunal yang ada sudah begitu kedap.

Atas prakarsa Inggris, pada tahun 1946 didirikan UMNO (*United Malay National Organization*), MCA (*Malayan Chinese Association*) yang didirikan pada tahun 1949, dan MIC (*Malayan Indian Congress*) yang didirikan pada tahun 1946. UMNO dimaksudkan untuk mewakili kepentingan

Melayu, MCA untuk mewakili etnis Cina, dan MIC untuk mewakili etnis India atau Pakistan.

Pada tahun 1963 isu primordialisme (komunalisme) mulai marak sehubungan dengan pembentukan Federasi Malaysia yang memasukkan Sabah, Serawak, dan Singapura sebagai Negara bagian. Hal tersebut dipandang oleh etnis Cina sebagai upaya untuk memperkuat basis Melayu, karena sebagian besar penduduk Sabah dan Serawak adalah etnis Melayu.

Tragedi tanggal 13 Mei 1969 merupakan tragedi yang hampir menghancurkan Malaysia. Tragedi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1969. Kampanye, dan isu-isu yang menyentuh emosi dan sentimen etnis telah "digembar-gemborkan". Isu-isu tersebut membangkitkan kebencian etnis Melayu kepada etnis Cina.

Mahathir Mohammad memaparkan bahwa pada awal kemerdekaan kesenjangan (*disparity*) ekonomi antara kaum pribumi dengan rakyat dari etnis Cina begitu melebar, sehingga menimbulkan perasaan iri hati dari kalangan pribumi. Saat itu, berkembang kebijakan bahwa orang pribumi hanya berkecimpung dalam pemerintahan, sedangkan warga keturunan Cina bergelut dalam niaga, dan orang keturunan India bermata pencaharian di perkebunan karet atau menjadi profesional.⁵

Ternyata, kebijakan membiarkan *disparitas* ini salah. Kampanye pada pemilihan umum Malaysia, pada tahun 1969, menunjukkan bahwa isu ras dan

⁵ Pikiran Rakyat, "Pribumi Bisa Maju," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/07/0101.htm>, diakses tanggal 3 April 2007.

agama dipertunjukkan secara besar-besaran. Ketegangan meningkat di antara orang Melayu dan Cina. Ketegangan tersebut memuncak dengan kerusuhan rasial yang meluas.⁶ Kerusuhan rasial yang melanda Malaysia di era tahun 1960-an dan 1970-an, warga ras Melayu membakar habis semua simbol etnis Cina karena perbedaan kondisi sosial dua etnis utama di Malaysia tersebut. Di Malaysia sebelum tahun 1969, politik digambarkan sebagai “*Consociational Democracy*”.⁷ Di kalangan berbagai etnis terdapat koalisi besar dan setiap kelompok etnis sama-sama dihargai. Kerusuhan tahun 1969 di Malaysia mengakhiri *Consociational Democracy* ini dan beralih pada *Unity in Diversity*.⁸

Dengan keragaman etnis, keberadaan *Unity in Diversity* menyebabkan Malaysia menjalankan aturan-aturan yang tidak diskriminatif bagi etnis minoritas, tetapi sebagai etnis terbesar, Melayu, mendapatkan banyak keistimewaan. Salah satunya di bidang pendidikan, terutama dalam masalah beasiswa dan seleksi masuk universitas. Etnis kedua dan ketiga terbesar di Malaysia, yaitu Cina dan India, lebih banyak belajar di sekolah swasta.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat Arend Lijphart, *Democracy in Plural Societies : A Comparative Exploration* (New Haven: Yale University Press, 1981).

⁸ Masih dapat diperdebatkan apakah Malaysia memiliki demokrasi *Consociational* sebelum kerusuhan rasial pada tahun 1969, karena konsep tersebut menganggap tidak adanya kelompok dominan dalam sistem dan ada veto timbal balik di kalangan partai-partai politik. Sangat sulit memperdebatkan apakah UMNO atau MCA sama keadaannya sebelum tahun 1969. namun Lijphart tetap meyakini bahwa sistem politik di Malaysia setelah tahun 1969 tidak lagi dapat disebut demokrasi *Consociational*. Lihat Lijphart.op.cit.; hal 150-157.

⁹ Arman, “Diskriminasi Rasial Diterapkan Untuk Melindungi Kepentingan Etnis Mayoritas,” <http://asiacalling.kbr68h.com/index.php/archives/291>, diakses tanggal 4 Desember 2007.

D. Kebijakan Ekonomi Baru (KEB)

Kebijakan Ekonomi Baru (KEB) Malaysia yang mulai berlaku pada tahun 1971 dianggap kebanyakan orang merupakan suatu upaya unik dan berani dalam bidang rekayasa sosial oleh sebuah negara berkembang yang masih muda. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh di bidang perekonomian. Suatu tuntutan yang dirasakan etnis Melayu telah diungkapkan dengan peristiwa berdarah tanggal 13 Mei 1969. Secara sepintas, kelihatannya, seakan-akan suatu bentrokan biasa, tetapi persoalan yang mendasar adalah ketidakpuasan dalam masalah ekonomi yang akan membahayakan persatuan nasional. Pemerintah mencoba mengambil langkah-langkah dan merumuskan sebuah kebijaksanaan baru yang kemudian terkenal dengan Kebijakan Ekonomi Baru (*New Economic Policy*).

KEB dicanangkan pada tahun 1971, seiring dengan dirumuskannya Rencana Malaysia yang dalam tahap pertama, pembangunan Malaysia ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Jadi, pada tahap pertama ini prioritas utamanya adalah memacu pertumbuhan ekonomi sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya, sedangkan distribusi pendapatan dianggap akan dapat terjadi dengan sendirinya. Terjadinya kesenjangan ekonomi, terutama antara Melayu dan Cina mengakibatkan perlunya upaya-upaya untuk dapat mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan lebih baik. Oleh sebab itu, seiring dengan RMK, prioritas ekonomi tidak lagi diprioritaskan pada pertumbuhan (Growth), tetapi justru ditekankan pada pemerataan (Equality).

KEB menggantikan berbagai kebijakan sejak kemerdekaan pada tahun 1957 yang mengutamakan pertumbuhan investasi sektor swasta, yang sebagian besar dipasol oleh orang-orang asing dan orang non pribumi. Kendati telah ada upaya sebelumnya untuk mendorong peran serta Bumiputera (Melayu dan Pribumi lain) dalam perdagangan dan industri melalui pembukaan lahan baru untuk perkebunan karet dan kelapa sawit, dan upaya melalui pendidikan, bantuan keuangan, dan proyek bidang usaha, ternyata, bahwa Bumiputera yang terkonsentrasi pada perekonomian pedesaan yang terbelakang membutuhkan jauh lebih banyak rangsangan apabila mereka ingin memainkan peranan yang cukup besar dalam sektor-sektor modern, yang sejauh ini, didominasi oleh non Bumiputera.

KEB, sebagaimana diterapkan dalam Rencana Malaysia Kedua (1971-1975) mempunyai dua tujuan utama. Dua tujuan utama KEB itu adalah::

1. Menurunkan dan secara bertahap melenyapkan kemiskinan
2. Mempercepat restrukturisasi masyarakat untuk mengoreksi ketidakseimbangan sumber daya ekonomi, dan menurunkan serta secara bertahap menghilangkan identifikasi fungsi berdasarkan ras.

Pembagian mata pencaharian berdasarkan garis rasial diyakini sebagai akar penyebab ketimpangan ekonomi dan keresahan sosial. Sasaran tertinggi dari KEB adalah memperkuat persatuan dan kesatuan nasional melalui pemerataan ekonomi, sehingga akan mengurangi ketimpangan antarrasial di segala bidang, termasuk penghasilan dan kekayaan. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, para pembuat kebijaksanaan berusaha

mengembangkan suatu kelas mengengah pengusaha Bumiputera dalam kurun waktu dua puluh tahun.

Suatu hasil yang jelas dari pelaksanaan KEB adalah ditinggalkannya falsafah *Free Enterprise* yang disetujui oleh pemerintah-pemerintah Negara bagian Malaysia sebelumnya, demi intervensi Negara secara langsung dan besar-besaran guna menciptakan sebuah kelas kapitalis Melayu. Pada awal tahun 1970-an, banyak dan beraneka ragam perusahaan Negara didirikan guna mencapai sasaran-sasaran besar, seperti: perubahan susunan masyarakat, menghapuskan ketimpangan ekonomi, menjembatani kesenjangan antara Bumiputera dan non Bumiputera, membangun dan menyediakan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan, menyebarkan pertumbuhan industri, menghapuskan kemiskinan, dan menciptakan lebih banyak lagi peluang bagi orang Melayu di sektor perdagangan dan industri.

Dalam tempo dua tahun, etnis yang terpecah tersebut kembali disatukan dalam satu partai campuran Perikatan oleh almarhum Tun Abdul Razak (PM waktu itu). Partai ini diperkuat dengan disertakan beberapa partai lawan. Saat ini terdapat empat belas buah partai dalam wadah Barisan Nasional. Kerajaan Pusat selalu memenangi mayoritas kursi di parlemen, sehingga tidak khawatir jika ditumbangkan oleh sebuah mosi tidak percaya.

Mahathir Mohammad menjadi anggota parlemen dari UMNO pada tahun 1964. Namun, pada tahun 1969 dia kehilangan kursinya dan dikeluarkan dari partai itu setelah mengirim surat terbuka yang mengecam Perdana Menteri kala itu, Tunku Abdul Rahman Putra (Perdana Menteri Malaysia

1957-1970), karena mengabaikan kelompok Melayu dan lebih menguntungkan etnis Cina.

Pada masa pengasingannya itulah, Mahathir Mohammad, menuangkan ide pemberdayaan Puak Melayu lewat "*The Malay Dilemma*". Ia menulis bahwa bangsa Melayu dikekang selama era kolonial dan dihukum karena menerima secara apatis status mereka sebagai kelas dua. Karena itu, etnis Melayu harus bangkit dan diberikan ruang yang lebih luas melalui penyediaan kesempatan dan pelunakkan regulasi ketika beraktivitas dalam perekonomian.

Sesungguhnya, "*Dilema Malaysia*" banyak dipengaruhi pemikiran akademisi Inggris Herbert Spencer yang mengakomodasi Teori sosial Darwinisme. Teori tersebut, antara lain, mengatakan bahwa sebuah kebijakan seharusnya membiarkan yang lemah dan tidak prima untuk gagal dan mati. Yang paling kuatlah yang bertahan (*survival of the fittest*).

Teori itu dipraktikkannya dengan logika sebaliknya. Mahathir Mohammad tidak benar-benar mengarahkan masyarakat dalam persaingan pasar, karena "persaingan alamiah" semacam itu hanya akan meminggirkan dan mematikan si lemah dan tidak kompetitif. Pada sisi ini, keberpihakan harus diberikan kepada si lemah demi membantunya untuk bangkit dalam kancah persaingan.

Selanjutnya, lahirlah kebijakan ekonomi baru (*new economic policy*), yang diterjemahkan menjadi kebijakan pribumi putra. Meski dipandang bernuansa rasialis dan diskriminatif, Mahathir Mohammad menegaskan, bahwa idenya tersebut tidak bermaksud menjadikan etnis Cina di Malaysia

untuk tersingkir, tetapi membiarkan Cina untuk tetap berkembang. Hanya saja, pemerintah tetap harus memberikan perhatian lebih besar kepada orang Melayu.

Keberpihakan itu sendiri, menurut Mahathir Mohammad, justru demi menghapuskan pengkotakan ras Melayu dan Cina. Buku Mahathir Mohammad itu menyemangati orang-orang muda UMNO, yang kemudian memanggilnya kembali untuk bergabung pada tahun 1974, dan menjadikannya sebagai menteri di bidang pendidikan. Saat itu Malaysia dipimpin Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein (PM Malaysia 1976-1980).

Pada tahun 1981, Mahathir Mohammad menjejak singgasana politik tertinggi Malaysia dengan menjadi PM keempat. Posisi vital dan amat menentukan tersebut memberinya kesempatan besar mentransformasikan ide dan gagasannya dalam "*The Malay Dilemma*" dalam praktik ekonomi nyata Malaysia.

Ambisi memajukan dan mengangkat martabat warga Melayu untuk sejajar dan berdiri harmonis dengan etnis lainnya dalam ekonomi Malaysia, dipadukan dengan sikapnya yang tidak bersahabat dengan musuh-musuh politiknya. Kekurangramahannya terhadap penentangannya, antara lain diwujudkan dengan menciptakan peraturan pada tahun 1987, yakni Undang-undang Keamanan Domestik (*Internal Security Act*). Dia memecat jaksa yang dia nilai terlalu mencampuri kebijakannya. Pada tahun 1993, dia meredam kekuasaan kerajaan.

Stabilitas dan kebangkitan ekonomi yang "ajaib" terjadi di Malaysia setelah menolak proposal bantuan dari *International Monetary Fund* (IMF). Penolakan Tersebut menempatkan sosok Mahathir Mohammad sebagai pemimpin terwibawa di Asia Tenggara. Bukan saja karena senioritasnya di antara pemimpin lain di kawasan Asia Tenggara, melainkan juga karena *achievement* gemilangnya dalam memakmurkan Malaysia.

Dengan posisi ekonomi yang lebih kuat, Mahathir Mohammad menjadi semacam juru bicara Asia Baru dalam meningkatkan nilai-nilai Asia dan Melayu. Mahathir Mohammad juga mengeritik standar ganda Barat. Mahathir Mohammad mengecam sikap Barat. Mahathir Mohammad melihat Barat sebagai sosok imperialis yang hingga kini masih berlanjut dalam bentuk ekonomi. Beberapa kutipan di atas adalah cermin dari sikap kerasnya itu. Latar belakang dari ucapannya itu adalah sikap Barat, termasuk pengertian globalisasi yang hanya memikirkan diri sendiri dan kurang peduli terhadap negara berkembang.

Pemimpin-pemimpin Dunia Timur menghargai Mahathir Mohammad, yang pidatonya selalu menarik bagi warga di Afrika, Timur Tengah, ataupun Jepang. Uniknya, dalam praktik Mahathir Mohammad tidak benar-benar antiglobalisasi. Investasi asing di Malaysia tidak pernah hengkang karena negeri itu menjamin keamanan dalam negeri serta stabilitas politiknya. Malaysia amat getol menyelenggarakan event internasional dalam berbagai bentuk (pariwisata, olahraga, budaya, dan sebagainya) yang selalu dikaitkan dengan kampanye investasi di sana.

Kepemimpinan dengan role model seperti Mahathir Mohammad, dalam pandangan Guru Besar Antropologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja, M.A sangat sesuai dengan kondisi objektif Asia (Tenggara), yang notabene masih merupakan negara berkembang (*developing countries*). Tipe kepemimpinan dalam situasi yang baru, memang harus bangkit dari kemerdekaan yang mensyaratkan sikap yang keras dan tegas. Ketika demokrasi masih menjadi ilusi, yang disebabkan prasyarat ekonomi tidak terpenuhi, kepemimpinan haruslah menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam bersikap. Ketegasan itu amat diperlukan untuk mengangkat karakter dan kultur masyarakat yang sebagian besar masih tradisional. Malaysia dengan bangga memproklamasikan identitas multikulturalnya, bahkan sampul *Encyclopedia of Malaysia* pada edisi arsitektur menggunakan ruko sebagai gambar utama.

Dimulailah peletakan dasar ekonomi baru untuk menyeimbangkan kondisi sosial ekonomi setiap etnis demi menghapus kerusuhan rasial. Kebijakan ekonomi propribumi itu, diwujudkan Mahathir Mohammad dengan memberikan peluang usaha, pinjaman modal, dan tempat berdagang di setiap kota kepada kaum Melayu dan pribumi lain. "Selain itu, kontrak perniagaan dari pemerintah, surat izin, serta rekomendasi lainnya untuk kalangan pribumi harus lebih dikekalkan," tegasnya.

Diakui Mahathir Mohammad, mengangkat derajat ekonomi kaum Melayu tidak semudah "membalik telapak tangan". Banyak juga yang menyalahgunakan kesempatan luas yang diberikannya. Mereka menjual izin,

rekomendasi, dan kontrak itu kepada orang Cina untuk mendapatkan uang tunai. Tapi memang, lebih banyak pribumi yang serius dan berhasil, bahkan dapat memperluas jangkauan usaha ke negara-negara lain.

Prasyarat pembangunan ekonomi, tegas Mahathir Mohammad, adalah kondisi politik yang stabil dan perekonomian yang dibangun melalui kerjasama yang erat antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk *Malaysia Incorporated*. Secara sengaja Mahathir Mohammad menerapkan konsep *Malaysia Incorporated* ini, dan memupuk kerjasama yang rapat di antara pemerintah dengan swasta dan kepemimpinan pekerja. Pertemuan dan dialog diadakan di antara ketiga pihak ini untuk menentukan cara-cara memajukan negara. Semuanya, menurut Mahathir Mohammad, harus dilakukan demi kemajuan Malaysia.

Penataan secara tegas (*affirmative action*) dalam menangani hubungan antaretnis Melayu, Cina, dan India akan mengurangi kecemburuan etnis dan mendorong percepatan pembangunan Malaysia. "...Keperluan *affirmative action* untuk menentukan kekayaan ekonomi dikongsi secara adil antarkaum,..." kata mantan Perdana Menteri Malaysia, Y.A.Bhg Tun Dr. Mahathir Mohammad Mohammad pada orasi ilmiahnya saat menerima Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Universitas Padjadjaran, Jln. Dipati Ukur Bandung.¹⁰

Mahathir Mohammad mengakui, bahwa *affirmative action* tersebut memiliki beberapa kendala, termasuk sifat orang Melayu sendiri yang belum

¹⁰ Suara Merdeka, "Membentuk Karakter Negeri," <http://www.suaramerdeka.com/harian/0107/09/kha3.htm>, diakses 4 April 2007.

siap. "Ramai yang menyalahgunakan peluang yang diberikan kepada mereka. Mereka menjual lesen (*surat izin*) dan kontrak kepada orang Cina untuk mendapatkan uang tunai," ujarnya. Kendala ini perlahan-lahan terkikis, walaupun juga mengorbankan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi hal ini akan berpengaruh pada *disparitas* yang mungkin dapat menimbulkan permusuhan antarkaum. Mahathir Mohammad memuji warga Cina yang mendukung kebijakan tersebut.

Affirmative action tidak hanya diberlakukan dalam pemberian peluang kepada pihak Melayu, tetapi juga dalam bidang penguasaan ilmu dan alih teknologi. Pemerintah menyediakan anggaran yang besar untuk pendidikan dan mengadakan beasiswa yang banyak bagi pribumi agar mampu berkompetisi dengan etnis lain, termasuk etnis Cina. Pendidikan tersebut membawa pribumi Malaysia dapat eksis dalam dunia bisnis, dan akhirnya, tidak lagi menjadi warga tertinggal. Disisi lain, pemerintah Malaysia tetap memberikan kesempatan kepada etnis Cina untuk terus berkembang, sehingga antara pribumi dan etnis Cina dapat hidup berdampingan secara damai.

Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Abdullah Ahmad Badawi, sudah menyinggung upaya merebut kemenangan dalam pemilihan umum tahun 2004 ketika memulai hari pertamanya sebagai perdana menteri. Badawi menggantikan Mahathir Mohammad Mohamad yang telah berkuasa selama 22 tahun.¹¹

¹¹ Pikiran Rakyat, "Badawi Mulai Konsentrasi Pemenangan Pemilu," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0104/28/0801.htm>, diakses tanggal 5 April 2007.

Partai yang dipimpin Badawi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), saat ini mendapat tekanan kuat dari Partai Islam se-Malaysia (PAS), yang pada pemilihan umum (pemilu) 1999 berhasil melipatgandakan perolehan kursi di parlemen. Badawi menyadari bahwa keberadaan etnis Cina ataupun India, di Malaysia sangat berarti bagi perolehan kursi partainya. Sehubungan dengan itu, dalam pidatonya, Badawi kembali mengutarakan pentingnya "memperkuat kesatuan ras sebagai pilar keutuhan negara".

Di Malaysia, antara pribumi dengan etnis Cina dapat hidup berdampingan secara damai karena pemerintah Malaysia menghargai keberadaan mereka dan mengakomodasi kebudayaan etnis Cina sebagai pemer kaya kebudayaan Malaysia.¹²

¹² *ibid.*